

## Presiden Jokowi Bayar Zakat Dibantu Robot di Istana Negara

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pembayaran zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/3).

Pembayaran zakat juga diikuti Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kemudian, para pimpinan lembaga negara, para kepala daerah, para direktur BUMN. "Di bulan Ramadhan yang suci ini kita diajarkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan hanya dengan berpuasa, tapi juga dengan memperbanyak amal-amalan, berlomba-lomba berbuat kebaikan termasuk berinfak sedekah dan juga berzakat," kata Jokowi dalam sambutannya di Istana Negara.

Pantauan di lokasi, usai sambutannya Jokowi langsung menuju ke meja tempat pembayaran zakat. Dibantu ajudannya, Jokowi mengeluarkan handphone memindai datanya untuk membayar zakat melalui robot zakat BAZNAS.

Setelahnya Jokowi menerima bukti pembayaran zakat. Pembayaran

zakat tersebut diikuti oleh Wapres Ma'ruf Amin serta menteri kabinet yang hadir dan juga kepala lembaga.

Pemerintah, kata Jokowi, terus berikhtiar dengan sekuat tenaga untuk mengurangi angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Ikhtiar tersebut, menurutnya, membutuhkan dukungan dan partisipasi dari semua pihak, termasuk melalui penghimpunan dan penyaluran dengan zakat infaq dan sedekah oleh Baznas.

"Karena itu dalam kesempatan yang sangat baik ini saya menghimbau kepada seluruh umat Islam khususnya pejabat-pejabat negara aparatur sipil negara, BUMN dan seluruh kepala daerah di seluruh tanah air untuk menunaikan kewajiban zakatnya melalui Baznas sehingga dana zakat dapat dikelola dengan profesional transparan," kata Jokowi.

Jokowi juga berpesan agar dana zakat yang terkumpul disalurkan tepat sasaran, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan keberkahan untuk semuanya. "Semoga zakat yang kita keluarkan akan menyempurnakan ibadah puasa kita, menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah SWT," kata Jokowi. • han

## MAKI Dinilai Tak Miliki "Legal Standing" Ajukan Praperadilan Terkait Lili Pintauli

JAKARTA (IM) - Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, perkumpulan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan praperadilan terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan terhadap mantan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siragar.

Seperti informasi, MAKI menggugat KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, terkait penghentian penyidikan atas dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan Lili.

Koordinator Tim Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto menyebut, MAKI dalam permohonannya menyatakan bahwa mereka merupakan organisasi kemasyarakatan. Namun, KPK berpandangan kedudukan hukum yang disebutkan MAKI tidak seperti yang diatur dalam undang-undang.

Koordinator Tim Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto menyebut, MAKI dalam permohonannya menyatakan bahwa mereka merupakan organisasi kemasyarakatan. Namun, KPK berpandangan kedudukan hukum yang disebutkan MAKI tidak seperti yang diatur dalam undang-undang.

dang. "Menurut termohon, pemohon tidak memiliki status kedudukan hukum atau legal standing yang sah sebagai suatu organisasi masyarakat," kata Iskandar dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Selasa (28/3).

Berdasarkan ketentuan, kata Iskandar, suatu organisasi masyarakat dapat melakukan tindakan hukum yang sah in casu pengajuan permohonan atau gugatan hukum jika memiliki surat keterangan terdaftar (ST) yang diterbitkan oleh menteri yang masih berlaku saat perkara didaftarkan dan sidang berlangsung.

Sementara itu, menurut Iskandar, saat MAKI mendaftarkan gugatan ke pengadilan, SKT-nya sudah tidak berlaku.

"Sehingga saat pemohon mengajukan pendaftaran perkara praperadilan aquo pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang teregistrasi dengan nomor 16/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel, maka secara jelas dan nyata diketahui bahwa SKT yang dimiliki pemohon sudah tidak berlaku sejak tanggal 9 November 2017," papar Iskandar.

Atas dasar itulah, pihak KPK menilai MAKI tidak memiliki legal standing.

Adapun gugatan ini diajukan MAKI ke PN Jakarta Selatan dilakukan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan terhadap adanya dugaan gratifikasi yang melibatkan Lili Pintauli Siragar saat menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. • mei

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL KESEHATAN 2024

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) berbicara dengan Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha (kiri) di sela rapat kerja bersama Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3). Rapat tersebut membahas Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024, termasuk transformasi aplikasi Peduli Lindungi menjadi Satu Sehat Mobile dan revitalisasi konsep pelayanan kesehatan primer mulai dari Puskesmas, Poskesdes serta Polindes yang akan disebut dengan Posyandu Prima.

## Kontras Minta DPR Tolak 3 Calon Hakim Ad Hoc HAM, Ini Alasannya

Tiga calon Hakim Ad Hoc HAM dinilai tak memenuhi syarat. Kontras meminta DPR agar tidak meloloskan ketiganya jadi hakim Ad Hoc HAM.

JAKARTA (IM) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta DPR menolak tiga calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) yang diusulkan Komisi Yudisial.

Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti menilai dari tiga calon tersebut tidak ada yang memenuhi syarat.

"Kontras mendesak agar Komisi III DPR RI untuk menolak ketiga Calon Hakim Ad Hoc HAM 2022/2023," ujar Fatia dalam keterangan tertulis, Selasa (28/3).

Ada beberapa alasan ketiga calon Hakim Ad Hoc HAM dinilai tak memenuhi syarat. Pertama, Kontras menilai para calon masih tidak bisa menjelaskan per-

bedaan antara pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat.

Fatia menilai para calon hakim berfokus pada bentuk tindakan, bukan pada unsur sistematis atau meluas dalam pelanggaran HAM berat. Hal itu disampaikan setelah memantau uji kelayakan calon Hakim Ad Hoc di Komisi III DPR RI Senin (27/3).

"Ketika dibenturkan pada pembahasan penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial, salah satu calon bahkan masih menganggap bahwa langkah tersebut lebih efektif, sementara ia sedang mengajukan diri untuk menjadi aktor dalam penyelesaian secara yudisial" ujar Fatia.

Alasan kedua, segi admi-

nistratif dua dari tiga calon memiliki potensi konflik kepentingan yang bisa mempengaruhi kinerja dan hasil pengadilan. Misalnya, calon Harnoto yang merupakan anggota aktif Polri dan berdnas di Tenaga Pendidik Madya pada sekolah polisi Polda Jawa Timur.

Menurut Fatia, Kepolisian merupakan salah satu pihak yang banyak disebut terlibat dalam terjadinya tragedi Paniai 2014 yang merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM berat.

"Dugaan keterlibatan sejumlah anggota Korps Bhayangkara dalam perkara yang menewaskan sedikitnya empat orang ini terdapat mulai dari awal kejadian hingga penghalangan keadilan (*obstruction of justice*)," imbuh Fatia.

Begitu juga dengan Happy Wajongkere yang menggunakan surat rekomendasi Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat Pen-

erangan Hukum Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung untuk proses seleksi.

Fatia menilai, Kejagung merupakan salah satu pihak yang menjadi penyidik dan penuntut dalam pengadilan HAM.

Diketahui, DPR RI telah melakukan uji kelayakan untuk tiga calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia pada Senin (27/3). Tiga calon tersebut yaitu:

1. M. Fatan Riyadhi,

merupakan mantan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh. Bidang Kompetensi Hak Asasi Manusia.

2. Heppy Wajongkere, merupakan pengacara pada Firma Hukum Heppy Wajongkere & Partners. Bidang Kompetensi Hak Asasi Manusia.

3. Harnoto, merupakan Anggota Polisi Republik Indonesia. Bidang Kompetensi: Hak Asasi Manusia. • mei

## Ketua PN Jaksel Batal Pimpin Sidang AG

JAKARTA (IM) - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) mengganti hakim tunggal yang akan memimpin sidang AG (15), pelaku anak dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy terhadap David (17).

Semula, Ketua PN Jaksel Saut Maruli Tua Pasaribu ditetapkan sebagai hakim yang menangani persidangan AG. Namun, belakangan, hakim tunggal yang menangani perkara itu diganti berdasarkan keputusan Ketua PN Jaksel.

"Ketua PN Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan tanggal 27 Maret 2023 tentang Pergantian Hakim yang menangani perkara anak AG, yang semula adalah Saut Maruli Tua Pasaribu diganti hakim Sri Wahyuni Batubara," kata Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyanto, Selasa (28/3).

Alasan pergantian hakim tersebut karena kesibukan Saut Maruli Tua Pasaribu sebagai Ketua PN Jakarta Selatan. PN Jakarta Selatan pun menunjuk Sri Wahyuni Batubara yang juga memiliki sertifikasi sebagai hakim anak.

"Alasan pergantian adalah kesibukan agenda kerja sebagai pimpinan pengadilan," imbuh Djuyanto.

Persidangan AG akan didahului dengan musyawarah diversi akan dihelat pada Rabu (29/3), hari ini.

Diversi, kata Djuyanto, adalah tahapan yang wajib dilakukan di tiap pemeriksaan baik di penyidikan, penuntutan, maupun di pengadilan yang berhubungan dengan kasus anak. Meski keluarga David secara terang-terangan menolak agenda Diversi, Djuyanto menyebut musyawarah harus tetap dilakukan

walaupun pada akhirnya terjadi penolakan di dalam sidang.

"Mengenal penolakan terhadap diversi, itu hak masing-masing. Jika keluarga korban telah menolak diversi, nanti akan disampaikan dalam forum musyawarah mediasi," beber Djuyanto.

AG dianggap turut terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap David bersama pacarnya, Mario Dandy Satrio (20), serta teman Mario, Shane Lukas (19).

Mario yang merupakan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Rafael Alun Trisambodo, menganiaya David pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Mario marah karena mendengar kabar dari saksi bernama Amanda yang menyebut AG kekasihnya mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Mario lalu menceritakan hal itu kepada temannya, Shane Lukas. Kemudian, Shane memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban sampai koma dan belum sadar hingga saat ini.

Shane dan AG ada di TKP saat penganiayaan berlangsung. Shane juga merekam penganiayaan yang dilakukan Mario. Kini, Shane dan Mario sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di ruang tahanan Mapolda Metro Jaya.

Sementara AG yang dilabeli sebagai pelaku atau anak berkonflik dengan hukum karena masih berstatus di bawah umur, ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Ketiganya diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. • mei

## Rafael Alun Bantah Lakukan Cuci Uang, KPK: Proses Hukum Masih Berjalan

JAKARTA (IM) - Mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo (RAT) membantah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Ia juga menepis tuduhan telah menggunakan konsultan pajak untuk melakukan pencucian uang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Rafael Alun untuk mengklarifikasi maupun membantah. Sebab, itu merupakan hak setiap warga negara.

Namun Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa proses penyelidikan terhadap Rafael Alun berjalan. Sebab, materi serta proses penyelidikan di KPK bersifat rahasia.

Namun dipastikannya bahwa proses penyelidikan terhadap Rafael Alun terus berjalan.

"Yang pasti proses penyelidikan itu, tim dari KPK akan terus mengklarifikasi, terus melakukan permintaan keterangan, melakukan bahan keterangan sehingga kemudian bisa dianalisis apakah

bersangkutan akan menyatakan apapun, ya saya kira haknya lah. tapi yang pasti kami tetap, aturan hukumnya seperti apa, perbuatannya seperti apa, sehingga bisa ditemukan siapa yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," kata kata Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (28/3).

Ali enggan membeberkan sudah sejauh mana proses penyelidikan terhadap Rafael Alun berjalan. Sebab, materi serta proses penyelidikan di KPK bersifat rahasia.

Namun dipastikannya bahwa proses penyelidikan terhadap Rafael Alun terus berjalan.

"Yang pasti proses penyelidikan itu, tim dari KPK akan terus mengklarifikasi, terus melakukan permintaan keterangan, melakukan bahan keterangan sehingga kemudian bisa dianalisis apakah

ada dugaan peristiwa pidana, dan siapa yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," beber Ali.

Sekadar informasi, KPK telah meningkatkan status temuan ketidakwajaran harta kekayaan Rafael Alun dari tingkat pemeriksaan dan klarifikasi di Kedeputusan Pencegahan ke tahap penyelidikan. KPK saat ini sedang menyelidiki dan mencari unsur pidana suap dan gratifikasi terkait harta janggal Rafael Alun Trisambodo.

Penyelidikan tersebut berawal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan adanya indikasi transaksi janggal diduga terkait pencucian uang di rekening Rafael Alun. PPATK menyebut ada peran konsultan pajak sebagai pihak profesional yang mengatur ataupun mengelola uang Rafael Alun. • han



## SIDANG PRAPERADILAN MAKI GUGAT KPK

Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Samuel Ginting (tengah) memimpin persidangan gugatan praperadilan Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (28/3). MAKI menggugat KPK terkait penghentian penyidikan dugaan gratifikasi terhadap mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siragar.

### PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 PP No. 15 tahun 1999 dengan ini diberitahukan bahwa telah disetujui untuk mengkonversi hutang Perseroan kepada pemegang saham menjadi saham Perseroan dengan cara pengelutaran saham dalam simpanan sejumlah 368.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 100.000,- per lembar saham; - Sehingga Modal Dasar Perseroan menjadi Rp.133.340.000.000,-. Modal ditempatkan dan disetor meningkat dari Rp.96.490.000.000,- atau setara dengan 964.900 lembar saham menjadi Rp.133.340.000.000,- atau setara dengan 1.333.400 lembar saham, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. MALEO LUWUK HOTEL, berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseroan) No.08/30-Akta Depot (Perjanjian Pembaruan Hutang Dalam Rangka Konversi Saham) No.05, keduanya tertanggal 22 Februari 2023, dibuat dihadapan Vidhya Shah, SH., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta, 29 Maret 2023 Direksi PT. MALEO LUWUK HOTEL

### INFORMASI PENUTUPAN KANTOR CABANG KB BUKOPIN

Yth Nasabah KB Bukopin,

Dengan ini kami informasikan bahwa efektif pada tanggal 31 Maret 2023 akan dilakukan penutupan layanan Kantor Cabang Operasional sebagai berikut:

#### Kantor Cabang Pembantu Juanda

Jalan Juanda BB No. 47  
Darat Sekip

Terkait dengan penutupan layanan tersebut, Nasabah KB Bukopin tetap dapat melakukan transaksi di seluruh jaringan cabang dan e-channel Bank KB Bukopin.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:  
Halo KB Bukopin 14005 dan Bank KB Bukopin  
Kantor Cabang Pontianak (0561) 751999

Hormat Kami,

PT Bank KB Bukopin, Tbk

KB Bukopin

### PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini PT Karya Bumi Prima, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dengan alamat kantor di gedung Grla Baramulti, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8, Jl. Suryopranoto No.2, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat - 10130 ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa pemegang saham Perseroan berencana untuk mengalihkan seluruh saham - sahamnya kepada pihak ketiga ("Pergalihan Saham"). Pergalihan Saham tersebut akan mengakibatkan perubahan pengendalian terhadap Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka bagi setiap pihak yang keberteratan atas rencana Pergalihan Saham dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Perseroan ke alamat sebagaimana tersebut diatas, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 29 Maret 2023  
Direksi  
PT KARYA BUMI PRIMA